

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laba adalah sebuah asersi yang diajukan oleh manajemen perusahaan, yang kualitasnya perlu mendapat pembuktian yang objektif dan transparan. Kualitas laba menjadi fokus utama bagi berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, dan pemerintah, karena mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Dalam konteks laporan keuangan, laba menempati posisi krusial sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Laba tidak hanya menjadi dasar utama dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah, tetapi juga mempengaruhi kebijakan dividen, yang pada gilirannya berdampak langsung pada kepentingan para pemegang saham (Hakim et al., 2023). Lebih lanjut, laba juga berfungsi sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan investasi, sehingga investor sering kali menggunakan laba untuk menilai apakah investasi di perusahaan tersebut menguntungkan atau tidak (Putri & Astuti, 2024).

Selain peranannya dalam keputusan eksternal, laba juga memainkan peran penting di dalam perusahaan itu sendiri (Kartika et al., 2023). Bagi pihak internal, khususnya manajemen, laba sering digunakan sebagai indikator kinerja yang dapat menjadi dasar pemberian kompensasi atau bonus. Dalam analisis laporan keuangan, baik yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti investor dan kreditor, maupun pihak internal seperti dewan direksi dan komite audit, laba menjadi parameter penting untuk menilai efektivitas strategi bisnis yang dijalankan (Renyaa & Sofian, 2024).

Manajemen laba adalah fenomena penting dalam akuntansi yang perlu diteliti (Setiowati et al., 2023). Fenomena manajemen laba telah

menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan dalam laporan keuangan perusahaan, terutama dalam konteks perusahaan yang terdaftar di pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia (BEI). Manajemen laba mengacu pada upaya perusahaan untuk mempengaruhi angka laba dalam laporan keuangan, baik melalui praktik akuntansi maupun tindakan tertentu yang memengaruhi laba akuntansi tanpa mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Pada perusahaan sektor kesehatan, yang menghadapi tekanan kompetitif yang tinggi dan tuntutan biaya yang besar, praktik manajemen laba sering kali digunakan untuk mempertahankan citra keuangan yang positif di hadapan investor dan pemegang saham. Praktik ini dapat membahayakan transparansi informasi keuangan dan membingungkan para pemegang saham dalam menilai kinerja perusahaan secara akurat (Sari, 2024). Pada tahun-tahun terakhir, isu terkait praktik manajemen laba ini semakin menjadi sorotan, terutama di periode 2021-2023 yang mencatat peningkatan ketidakpastian dalam sektor kesehatan akibat pandemi COVID-19.

Penelitian Hadiwardoyo (2020) menyebut pandemi COVID-19 sebagai ladang rejeki bagi industri kesehatan, karena permintaan masker, handsanitizer, disinfektan, sabun, dan sejenisnya sangat tinggi. Penelitian lain menemukan kinerja keuangan industri mengalami lonjakan selama tahun 2020-2021. Dengan demikian, pandemi membuat kinerja keuangan perusahaan di sektor kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kinerja ini tentunya menyebabkan potensi manipulasi laba. Beberapa penelitian melaporkan adanya praktik manipulasi laba pada sektor kesehatan di Indonesia, seperti Sueb (2024) yang menemukan bahwa praktik manipulasi laba untuk mengurangi pajak pendapatan. Azzahro (2022) melaporkan adanya manipulasi laba untuk tujuan penghindaran pajak. Indrawati & Hanif (2023) mengatakan bahwa sektor kesehatan memanfaatkan

peluang manipulasi laba selama pandemi untuk mendongkrak kinerjanya. Jadi, kinerja keuangan yang meningkat selama pandemi dimanfaatkan oleh sektor kesehatan untuk melakukan manipulasi dengan tujuan menghindari pajak, mengurangi pajak, bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Fluktuasi kinerja keuangan meningkatkan potensi manipulasi laba, terutama saat perusahaan menghadapi peristiwa besar seperti pandemi. Perusahaan cenderung melakukan manajemen laba ketika kinerja keuangannya terpengaruh oleh peristiwa tertentu. Contohnya, *Microsoft* menggunakan strategi "*Rainy Day*" untuk menyimpan laba dari periode yang menguntungkan dan melaporkannya saat kinerja menurun (Sakti et al., 2024). Di sektor kesehatan, perusahaan seperti *Cardinal Health* dan *Valeant Pharmaceutical* juga terlibat dalam manipulasi laba (Faizah et al., 2020). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mencatat 130 kasus kecurangan di industri kesehatan dengan kerugian lebih dari \$100.000, meskipun frekuensi manipulasi laporan keuangan hanya 9%.

Tabel 1. 1 Nilai Manajemen Laba Perusahaan Sektor Kesehatan

NO.	KODE	2021	2022	2023
1	DVLA	-0,0526	0,1225	0,0764
2	KLBF	0,1466	0,1920	0,0965
3	MIKA	0,0576	0,1369	0,1112
4	SIDO	0,1579	0,0914	0,0650
5	SILO	0,0483	0,0762	0,1297
6	TSPC	0,1097	0,1350	0,1008
7	PEHA	-0,0229	0,0484	0,0727

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1. menunjukkan variasi nilai manajemen laba pada perusahaan-perusahaan sektor kesehatan di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023, dan memberikan gambaran perusahaan yang dikategorikan melakukan manajemen laba. Darya-Varia Laboratoria Tbk

(DVLA) mengalami perubahan signifikan dari negatif pada 2021 (-0,0526) menjadi positif pada 2022 (0,1225) dan sedikit menurun pada 2023 (0,0764), mengindikasikan adanya usaha untuk memperbaiki laporan laba sehingga dapat dikategorikan melakukan manajemen laba. Kalbe Farma Tbk (KLBF) mencatat nilai positif stabil dari 2021 (0,1466) hingga 2023 (0,0965), dengan sedikit fluktuasi yang mencerminkan pola penyesuaian laba dan mengindikasikan manajemen laba. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) menunjukkan peningkatan dari 2021 (0,0576) ke 2022 (0,1369), meskipun sedikit menurun pada 2023 (0,1112). Konsistensi ini menunjukkan strategi menjaga stabilitas performa laba, sehingga juga termasuk kategori perusahaan yang melakukan manajemen laba. Industri Jamu dan Farmasi Sido (SIDO) mencatat penurunan bertahap dari 2021 (0,1579) hingga 2023 (0,0650), yang menggambarkan penyesuaian laba yang lebih moderat dan tidak mengindikasikan adanya praktik manajemen laba secara signifikan. Siloam Internasional Hospitals (SILO) menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 2021 (0,0483) hingga 2023 (0,1297), mengindikasikan upaya menjaga performa laba yang memungkinkan perusahaan ini dikategorikan melakukan manajemen laba. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) menunjukkan stabilitas dengan peningkatan laba dari 2021 (0,1097) ke 2022 (0,1350) dan sedikit penurunan pada 2023 (0,1008), yang mencerminkan pengelolaan laba yang tidak terlalu signifikan, sehingga kurang dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan manajemen laba.

Sementara itu, Phapros Tbk (PEHA) berhasil memperbaiki kinerja dari nilai negatif pada 2021 (-0,0229) ke positif pada 2022 (0,0484) dan meningkat lagi pada 2023 (0,0727), menunjukkan usaha untuk memperbaiki laporan laba dan termasuk dalam kategori manajemen laba. Secara keseluruhan, perusahaan yang mengindikasikan manajemen laba adalah DVLA, KLBF, MIKA, SILO, dan PEHA.

Laporan keuangan berperan sebagai alat penting dalam mengevaluasi kondisi finansial dan kinerja perusahaan selama periode tertentu (Mustofa et al., 2023). Informasi mengenai laba yang disajikan dalam laporan ini menjadi indikator kunci bagi manajemen, investor, dan kreditor (Zulfia & Setyowati, 2023). Namun, kesadaran manajemen akan pentingnya laba bisa mendorong perilaku yang tidak etis, seperti pengelolaan laba yang berpotensi mengurangi transparansi dan akurasi laporan keuangan. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan yang bergantung pada informasi tersebut untuk membuat keputusan yang tepat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen laba itu adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah praktik yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum atau peraturan pajak yang ada. Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* dengan berbagai cara, termasuk menunda pembayaran pajak, mentransfer keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, atau menggunakan skema perpajakan yang kompleks (Lestari et al., 2023). Dalam industri kesehatan, penghindaran pajak yang dilakukan secara efektif dapat memberikan dampak positif terhadap laporan laba bersih, sehingga meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor. Namun, penghindaran pajak yang dilakukan tanpa transparansi dapat merusak reputasi perusahaan dan berisiko menghadapi sanksi dari otoritas perpajakan. Situasi ini menciptakan dilema bagi perusahaan, di mana mereka harus menyeimbangkan antara keuntungan finansial jangka pendek dan tanggung jawab sosial serta etika bisnis (Rohali & Utomo, 2022).

Dalam konteks perusahaan sektor kesehatan, manajemen laba dapat menjadi masalah yang serius. Perusahaan sektor kesehatan seringkali memiliki keuntungan yang tinggi, sehingga mereka menjadi target yang menarik untuk dilakukan manajemen laba. Selain itu,

perusahaan sektor kesehatan juga seringkali memiliki struktur perpajakan yang kompleks, sehingga mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan *tax avoidance*. Berbagai cara digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak, karena bagi manajemen, pajak yang dibayarkan dianggap sebagai beban yang harus ditanggung. Salah satu faktor yang dapat mengurangi laba adalah adanya beban pajak tangguhan, sehingga perusahaan mencari cara untuk memaksimalkan laba dengan menekan beban pajak tanpa melanggar aturan. Dalam konteks laba akuntansi, biaya pajak terdiri dari jumlah agregat pajak tangguhan dan pajak kini. Untuk menjaga agar pengurangan pajak tetap aman, perusahaan menerapkan strategi *tax avoidance* (Sutadipraja et al., 2020). Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh manajemen secara langsung atau melalui implikasi tertentu.

Tabel 1. 2 Nilai Tax Avoidance Perusahaan Sektor Kesehatan

NO.	KODE	2021	2022	2023
1	DVLA	0,3945	0,3063	0,1768
2	KLBF	0,2335	0,2613	0,2786
3	MIKA	0,1432	0,2662	0,3086
4	SIDO	0,1955	0,2368	0,2214
5	SILO	0,3780	0,3229	0,2494
6	TSPC	0,5995	0,4877	0,5577
7	PEHA	1,3365	0,4203	1,8863

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1.2., mayoritas perusahaan sektor kesehatan memiliki nilai CETR di bawah 25% selama periode 2021 hingga 2023, sehingga masuk dalam kategori melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang termasuk dalam kategori ini adalah Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA), Kalbe Farma Tbk (KLBF), Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), Industri Jamu dan Farmasi Sido (SIDO), dan

Siloam Internasional Hospitals (SILO), yang seluruhnya memiliki nilai CETR yang konsisten di bawah 25% setiap tahun.

Namun, terdapat dua perusahaan yang memiliki nilai CETR di atas 25% di semua tahun, yaitu Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) dan Phapros Tbk (PEHA). TSPC mencatat nilai CETR sebesar 0,5995 pada 2021, 0,4877 pada 2022, dan 0,5577 pada 2023, sedangkan PEHA menunjukkan nilai yang bahkan jauh lebih tinggi, yaitu 1,3365 pada 2021, 0,4203 pada 2022, dan 1,8863 pada 2023. Nilai CETR ini mengindikasikan bahwa kedua perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak karena secara konsisten membayar pajak lebih dari ambang batas 25%. Secara keseluruhan, TSPC dan PEHA menjadi contoh perusahaan yang menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi dibandingkan perusahaan lain dalam sektor kesehatan. Hal ini mencerminkan strategi pengelolaan pajak yang lebih konservatif dan cenderung sesuai dengan kewajiban perpajakan yang berlaku.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi manajemen laba itu adalah pajak kini. Pajak kini mencerminkan beban pajak yang diakui berdasarkan laba kena pajak dalam periode berjalan. Dalam praktik manajemen laba, pajak kini memungkinkan perusahaan untuk mengatur beban pajak dalam laporan keuangan dengan menyesuaikan pengakuan pendapatan dan biaya tertentu, yang berdampak pada laba bersih yang dilaporkan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pajak kini sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan karena fleksibilitasnya dalam pengaturan pajak yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan arus kas keluar langsung (Pratama et al., 2022).

Fenomena ini semakin relevan di tengah peningkatan biaya operasional di sektor kesehatan serta kebutuhan untuk menjaga profitabilitas di tengah tuntutan layanan kesehatan yang tinggi. Berdasarkan laporan tahunan beberapa perusahaan kesehatan di Indonesia pada periode 2021-2023, terdapat kecenderungan untuk

melaporkan laba yang stabil meskipun beban operasional dan pajak mengalami fluktuasi. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi praktik manajemen laba melalui pengaturan pajak kini dalam laporan keuangan perusahaan sektor kesehatan selama periode tersebut (Indriyani et al., 2023).

Tabel 1. 3 Nilai Pajak Kini Perusahaan Sektor Kesehatan

NO.	KODE	2021	2022	2023
1	DVLA	0,0340	0,0263	0,0265
2	KLBF	0,0402	0,0387	0,0365
3	MIKA	0,0540	0,0409	0,0395
4	SIDO	0,0905	0,0763	0,0665
5	SILO	0,0138	0,0162	0,0210
6	TSPC	0,0222	0,0315	0,0276
7	PEHA	0,0007	0,0075	0,0021

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1.3., data dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan variasi beban pajak kini pada perusahaan sektor kesehatan di Indonesia, yang dapat mencerminkan praktik manajemen laba. Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) mengalami penurunan rasio beban pajak kini dari 0,0340 pada 2021 menjadi 0,0263 pada 2022, dengan sedikit kenaikan ke 0,0265 pada 2023. Pola ini dapat menunjukkan upaya menjaga stabilitas laba bersih melalui pengaturan beban pajak. Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) juga menunjukkan tren penurunan bertahap pada beban pajak kini, yang mungkin mengindikasikan praktik pengaturan beban pajak untuk menjaga konsistensi laba bersih di tengah fluktuasi biaya operasional. Sebaliknya, Siloam International Hospitals (SILO) menunjukkan peningkatan rasio pajak kini dari 0,0138 pada 2021 ke 0,0210 pada 2023. Hal ini bisa mencerminkan penyesuaian perusahaan terhadap kenaikan biaya operasional, yang memengaruhi beban pajak dan laba yang dilaporkan. (PEHA) menunjukkan fluktuasi signifikan dari 0,0007

pada 2021 ke 0,0075 pada 2022, lalu kembali turun ke 0,0021 pada 2023, yang mengindikasikan dinamika pengelolaan beban pajak. Secara keseluruhan, perusahaan yang dapat dikategorikan menggunakan pajak kini dalam praktik manajemen laba adalah DVLA, KLBF, dan MIKA karena menunjukkan pola penurunan atau stabilitas yang memungkinkan laba bersih tetap terjaga.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi manajemen laba itu adalah pajak tangguhan. Pajak tangguhan mencerminkan perbedaan waktu pengakuan laba untuk tujuan akuntansi dan perpajakan. Dalam konteks manajemen laba, pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban, sehingga mempengaruhi jumlah laba yang dilaporkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak tangguhan sering digunakan sebagai alat untuk memanipulasi laba karena fleksibilitasnya dalam pengaturan pajak yang tidak langsung terkait dengan kas perusahaan (Trisia & Kurnia, 2019).

Tabel 1. 4 Nilai Pajak Tangguhan Perusahaan Sektor Kesehatan

NO.	KODE	2021	2022	2023
1	DVLA	0,0013	0,0015	0,0039
2	KLBF	0,0008	0,0005	0,0005
3	MIKA	0,0021	0,0016	0,0009
4	SIDO	0,0009	0,0011	0,0006
5	SILO	0,0001	0,0009	0,0010
6	TSPC	0,0020	0,0011	0,0035
7	PEHA	0,0001	0,0001	0,0012

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1.4., Pajak tangguhan memungkinkan perusahaan mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban, yang dapat memengaruhi laba yang dilaporkan. Pajak ini sering dimanfaatkan dalam manajemen laba karena tidak langsung berhubungan dengan arus

kas keluar. Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) menunjukkan peningkatan rasio pajak tangguhan dari 0,0013 pada 2021 menjadi 0,0039 pada 2023, yang menunjukkan strategi yang lebih agresif dalam mengatur beban pajak untuk menstabilkan laporan laba mereka. Ini menunjukkan bahwa DVLA terlibat dalam praktik manajemen laba dengan menggunakan pajak tangguhan untuk menjaga kinerja laba yang lebih konsisten dan menarik bagi investor. Kalbe Farma Tbk (KLBF), di sisi lain, mempertahankan rasio pajak tangguhan yang sangat rendah dan stabil, yaitu sekitar 0,0005 dari 2022 hingga 2023. Ini menunjukkan pendekatan konservatif dalam pengelolaan pajak tangguhan, yang mencerminkan kebijakan pengakuan pajak yang tidak terlalu terlibat dalam praktik manajemen laba. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) mengalami penurunan rasio pajak tangguhan dari 0,0021 pada 2021 menjadi 0,0009 pada 2023, yang bisa mengindikasikan penyesuaian dalam mengelola laporan laba bersih, seiring dengan fluktuasi biaya operasional yang terjadi di perusahaan. Ini menunjukkan bahwa MIKA mencoba menyesuaikan laba dengan mengurangi penggunaan pajak tangguhan. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) menunjukkan peningkatan signifikan dalam rasio pajak tangguhan dari 0,0011 pada 2022 menjadi 0,0035 pada 2023, yang mungkin mencerminkan strategi manajemen laba yang lebih agresif. Perusahaan ini mungkin menggunakan pajak tangguhan untuk mengatur pengakuan laba sesuai dengan kebutuhan finansial atau perubahan pasar. Phapros Tbk (PEHA) dan Siloam Internasional Hospitals (SILO) juga mencatatkan kenaikan rasio pajak tangguhan pada 2023, yang menunjukkan penyesuaian terhadap perubahan kondisi pasar dan keuangan yang memengaruhi pengakuan pajak dan laba mereka. Berdasarkan analisis ini, perusahaan-perusahaan yang mengalami peningkatan atau penyesuaian signifikan pada rasio pajak tangguhan, seperti DVLA, TSPC, dan SILO, bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan praktik pajak tangguhan untuk

manajemen laba, sedangkan perusahaan-perusahaan yang menunjukkan stabilitas atau penurunan rasio pajak tangguhan, seperti KLBF dan MIKA, cenderung tidak terlibat dalam praktik ini.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi manajemen laba itu adalah aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan mencerminkan perbedaan waktu pengakuan beban pajak antara pelaporan akuntansi dan perpajakan, yang dapat dimanfaatkan dalam praktik manajemen laba. Dengan aset pajak tangguhan, perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengatur pengakuan beban pajak untuk menyesuaikan jumlah laba yang dilaporkan pada periode tertentu, tanpa memengaruhi arus kas langsung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan sering digunakan sebagai instrumen untuk mengelola laba, karena kemampuannya menunda beban pajak dan menjaga stabilitas laba dalam laporan keuangan (Pasha, 2024).

Fenomena ini menjadi semakin penting di tengah kondisi sektor kesehatan yang menghadapi fluktuasi biaya operasional dan tekanan untuk mempertahankan profitabilitas. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan kesehatan di Indonesia pada periode 2021-2023, terdapat kecenderungan untuk melaporkan laba yang konsisten meskipun ada perubahan dalam beban operasional dan pajak. Situasi ini mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan mungkin memanfaatkan aset pajak tangguhan sebagai salah satu strategi manajemen laba dalam laporan keuangan mereka (Mandiri, 2023).

Tabel 1. 5 Nilai Aset Pajak Tangguhan Perusahaan Sektor Kesehatan

NO.	KODE	2021	2022	2023
1	DVLA	0,0106	0,1047	0,1778
2	KLBF	0,0701	0,2794	0,0632
3	MIKA	-0,6143	-0,5082	0,2029
4	SIDO	-0,0053	-0,2424	0,0910
5	SILO	-0,0370	0,0425	-0,9248
6	TSPC	-0,0273	-0,2917	0,0708
7	PEHA	-0,1781	-0,2762	0,1189

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1.5., data mengenai aset pajak tangguhan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan di antara perusahaan sektor kesehatan di Indonesia, yang dapat mencerminkan praktik manajemen laba. Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) mengalami peningkatan yang signifikan dalam rasio aset pajak tangguhan, dari 0,0106 pada 2021 menjadi 0,1778 pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa DVLA menggunakan aset pajak tangguhan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas laba dan mengatur pengakuan pajak, yang dapat mengindikasikan praktik manajemen laba agresif. Kalbe Farma Tbk (KLBF), di sisi lain, mencatatkan penurunan aset pajak tangguhan dari 0,2794 pada 2022 menjadi 0,0632 pada 2023, yang menunjukkan kebijakan konservatif dalam mengelola pajak tangguhan. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa KLBF cenderung tidak terlibat dalam praktik manajemen laba agresif, dengan fokus pada pengelolaan pajak yang lebih stabil dan tidak banyak mengandalkan penyesuaian pajak tangguhan. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) mengalami perubahan signifikan, dengan rasio aset pajak tangguhan negatif pada 2021 dan 2022, namun berbalik positif menjadi 0,2029 pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa MIKA menyesuaikan pengakuan pajak tangguhan untuk meningkatkan laba bersih, yang dapat mencerminkan upaya perusahaan dalam mengelola laporan laba bersih,

berpotensi menggunakan aset pajak tangguhan dalam praktik manajemen laba. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang dapat dikategorikan menggunakan aset pajak tangguhan dalam praktik manajemen laba adalah DVLA dan MIKA. Sebaliknya, KLBF dengan penurunan yang lebih konservatif menunjukkan bahwa perusahaan ini lebih menghindari penggunaan agresif aset pajak tangguhan untuk manajemen laba.

Liabilitas pajak tangguhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen laba, terutama di sektor kesehatan yang menghadapi tekanan untuk mempertahankan profitabilitas di tengah kenaikan biaya operasional. Liabilitas pajak tangguhan menunjukkan kewajiban pajak yang mungkin dibayarkan di masa mendatang akibat perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Dalam konteks manajemen laba, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah liabilitas pajak tangguhan untuk mengontrol besar-kecilnya laba bersih yang dilaporkan. Beberapa penelitian mendukung bahwa liabilitas pajak tangguhan sering dimanfaatkan sebagai alat manajemen laba karena fleksibilitasnya dalam penyesuaian tanpa pengaruh langsung terhadap arus kas (Yuiandini, 2023).

Tabel 1. 6 Nilai Liabilitas Pajak Tangguhan Perusahaan Sektor Kesehatan

NO.	KODE	2021	2022	2023
1	DVLA	0,0008	0,0020	0,0006
2	KLBF	0,0007	0,0011	0,0013
3	MIKA	0,0002	0,0001	0,0001
4	SIDO	0,0035	0,0025	0,0025
5	SILO	0,0052	0,0057	0,0051
6	TSPC	0,0065	0,0040	0,0075
7	PEHA	0,0004	0,0078	0,0090

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1.6., nilai liabilitas pajak tangguhan pada perusahaan sektor kesehatan menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, mencerminkan penggunaan liabilitas pajak tangguhan dalam manajemen laba. Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) menurunkan liabilitas pajak tangguhannya dari 0,0020 pada 2022 menjadi 0,0006 pada 2023, yang mengindikasikan bahwa perusahaan ini mencoba menjaga stabilitas laba bersihnya dengan menyesuaikan liabilitas pajak tangguhan. Hal ini menunjukkan kebijakan konservatif dalam pengelolaan pajak yang dapat berhubungan dengan strategi manajemen laba yang hati-hati. Kalbe Farma Tbk (KLBF) menunjukkan peningkatan liabilitas pajak tangguhan dari 0,0007 pada 2021 menjadi 0,0013 pada 2023. Peningkatan bertahap ini dapat mencerminkan upaya perusahaan untuk mempertahankan konsistensi dalam laporan laba mereka, meskipun dengan sedikit penyesuaian terhadap kewajiban pajak yang tercatat. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) mengalami kenaikan signifikan dari 0,0040 pada 2022 menjadi 0,0075 pada 2023. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa TSPC mungkin menggunakan liabilitas pajak tangguhan untuk mengatur pengakuan laba, yang berfungsi untuk meningkatkan daya tarik laporan keuangan mereka kepada investor dan menjaga stabilitas laba bersih di tengah fluktuasi biaya operasional. Siloam International Hospitals (SILO) dan Phapros Tbk (PEHA) juga mengalami fluktuasi pada liabilitas pajak tangguhan, dengan SILO yang tetap stabil antara 0,0052 hingga 0,0057, dan PEHA yang meningkat dari 0,0004 pada 2021 menjadi 0,0090 pada 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini juga mungkin menggunakan liabilitas pajak tangguhan dalam pengelolaan laba mereka, meskipun dengan strategi yang berbeda-beda. Berdasarkan analisis ini, perusahaan yang menunjukkan peningkatan atau fluktuasi signifikan pada liabilitas pajak tangguhan, seperti TSPC dan PEHA, bisa dikategorikan sebagai

perusahaan yang menggunakan liabilitas pajak tangguhan untuk praktik manajemen laba, sementara perusahaan dengan penurunan atau stabilitas liabilitas pajak tangguhan, seperti DVLA dan KLBF, menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif dalam pengelolaan pajak mereka (Rhofitania et al., 2023).

Salah satu contoh yang relevan dalam konteks bagaimana manipulasi laporan keuangan dapat berimplikasi pada aspek perpajakan adalah kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun buku 2018. Meskipun fokus utama kasus ini adalah kontroversi pengakuan pendapatan dari perjanjian Mahata Aero Teknologi, praktik akuntansi yang dinilai tidak sesuai standar ini secara langsung memengaruhi nilai laba bersih yang dilaporkan. Dalam skenario normal, laba yang dilaporkan adalah basis perhitungan pajak penghasilan. Ketika laba digelembungkan melalui praktik yang tidak sesuai PSAK, hal ini berpotensi memengaruhi kewajiban pajak perusahaan di mata regulator, meskipun kemudian dikoreksi. Kasus ini menggarisbawahi bagaimana intervensi manajemen dalam penyajian laporan keuangan dapat menciptakan 'laba semu' yang, jika tidak diawasi ketat, akan memiliki konsekuensi signifikan terhadap basis pajak yang transparan dan adil (Husna et al., 2025).

Pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan merupakan komponen krusial dalam pengelolaan laba perusahaan. Memahami interaksi antar komponen ini sangat penting untuk menganalisis cara perusahaan dapat mengelola laba dengan efektif. Pajak kini mencerminkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan pada periode saat ini, sementara pajak tangguhan berkaitan dengan pajak yang akan dibayarkan di masa depan. Aset pajak tangguhan muncul ketika perusahaan mengalami kerugian yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak di masa mendatang, sedangkan

liabilitas pajak tangguhan berhubungan dengan pengakuan pendapatan yang lebih awal daripada kewajiban pajak (Sutadipraja et al., 2020).

Mengingat kompleksitas ini, penelitian ini akan fokus pada analisis pengaruh *tax avoidance*, pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan signifikan antara variabel-variabel tersebut serta dampaknya terhadap keputusan manajerial dalam penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk manajer perusahaan, investor, dan pembuat kebijakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan merumuskan strategi pengelolaan pajak dan manajemen laba yang lebih efektif, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan asuransi. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi, yang sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang sektor ini di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laba yang dilaporkan perusahaan menjadi perhatian utama bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah, karena dianggap sebagai indikator penting kinerja keuangan dan prospek perusahaan.
2. Perusahaan di sektor kesehatan berada di bawah tekanan kompetitif tinggi, yang mendorong praktik manajemen laba untuk mempertahankan citra positif atau mengurangi beban pajak.

3. Praktik manajemen laba menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengurangi transparansi dan memengaruhi informasi keuangan yang dibutuhkan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Lonjakan permintaan produk kesehatan selama pandemi COVID-19 meningkatkan laba perusahaan, yang membuka peluang bagi beberapa perusahaan untuk memanipulasi laba guna mengurangi pajak.
5. Praktik manipulasi laba merugikan pemerintah karena mengurangi penerimaan pajak dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor yang mengandalkan laporan keuangan untuk keputusan investasi.
6. Terdapat variasi dalam praktik manajemen laba, penghindaran pajak, pajak kini, dan pajak tangguhan di perusahaan-perusahaan sektor kesehatan, yang mengindikasikan kompleksitas praktik manajemen laba dalam menghadapi fluktuasi biaya dan pajak.
7. Sektor kesehatan dipilih karena peran pentingnya dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas keuangan, terutama setelah dampak pandemi COVID-19.
8. Perusahaan di sektor kesehatan menghadapi tekanan kompetitif yang tinggi, sehingga cenderung lebih sering terlibat dalam praktik manajemen laba, yang berdampak langsung pada kredibilitas laporan keuangan dan penerimaan pajak pemerintah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terbatas pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini hanya menganalisis data dari tahun 2021 hingga 2023.

3. Penelitian ini fokus pada pengaruh *tax avoidance*, pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk analisis data.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *tax avoidance* terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
2. Bagaimana pengaruh pajak kini terhadap manajemen laba dalam perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
3. Bagaimana pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
4. Bagaimana pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba di perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
5. Bagaimana pengaruh liabilitas pajak tangguhan terhadap manajemen laba di perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
6. Bagaimana pengaruh *tax avoidance*, pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan secara bersama-sama terhadap manajemen laba di perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh pajak kini terhadap manajemen laba dalam perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba di perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh liabilitas pajak tangguhan terhadap manajemen laba di perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
6. Untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance*, pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan secara bersama-sama terhadap manajemen laba di perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

F. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara pajak dan

manajemen laba dalam industri kesehatan. Selain itu, penulis juga akan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian dan analisis data, yang sangat berharga untuk pengembangan diri di bidang akademis dan profesional di masa depan.

2. Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak yang lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas. Selain itu, informasi yang dihasilkan juga relevan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait laporan keuangan dan kebijakan perpajakan, sehingga mendukung kinerja perusahaan yang lebih baik.

3. Bagi investor

Bagi investor, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana penghindaran pajak dan manajemen laba mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan demikian, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan melakukan evaluasi risiko investasi yang lebih mendalam, terkait transparansi laporan keuangan perusahaan.

4. Bagi regulator dan pembuat kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efektif. Selain itu, penelitian ini mendorong regulator untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat mengenai penghindaran pajak dan manajemen laba, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar.

5. Bagi masyarakat

Penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan. Selain itu, hasilnya dapat menginspirasi perusahaan untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab

dalam pengelolaan laba dan pajak, yang berdampak positif pada kesejahteraan sosial.

6. Bagi lingkungan bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam industri asuransi dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan asuransi juga dapat mendukung stabilitas pasar yang lebih baik.

7. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi yang ingin mengembangkan studi lebih lanjut tentang manajemen laba dan perpajakan di berbagai sektor. Selain itu, penelitian ini juga menyediakan bukti empiris yang dapat digunakan untuk mendukung atau menantang teori-teori yang ada dalam literatur akuntansi dan manajemen.

8. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk mengeksplorasi aspek-aspek lain dari penghindaran pajak dan manajemen laba dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, hasil penelitian ini juga menawarkan metodologi dan pendekatan analisis yang dapat diterapkan atau dimodifikasi dalam penelitian yang akan datang, sehingga membuka peluang untuk inovasi lebih lanjut.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami uraian penelitian dengan lebih baik, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terstruktur. Dengan cara ini, informasi dapat disampaikan secara efektif. Berikut adalah rincian sistematika penulisan yang telah disusun:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian atau penulisan, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai konteks dan pentingnya topik yang akan dibahas.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan dasar teori yang kuat dan mengidentifikasi celah penelitian yang ada. Bab ini juga menyajikan definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik sampling, serta alat atau instrumen penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan prosedur analisis data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini memastikan bahwa penelitian dapat di replikasi atau diuji validitasnya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan, yang dipaparkan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, serta interpretasi dari hasil tersebut. Selain itu, bab ini juga membahas temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori-teori yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka dan menjawab

rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memberikan ringkasan dari temuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Selain itu, bab ini juga memberikan saran praktis atau implikasi dari penelitian bagi para pembaca atau pihak terkait, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar lebih komprehensif.

